

Memaknai TWK KPK dalam Reproduksi Wacana dengan Pemanfaatan Modal Sosial: Studi Kasus Data Percakapan TWK KPK di Media Sosial *Twitter*

Meirza Luthfi Pradana¹, Vincencius Alvian Pratama², Rika Aulia Ramdhani³,
Panji Putranto Nugrahagung⁴

Diserahkan: 24 Desember 2021 | Diterima: 24 Oktober 2022 |

Diterbitkan: 30 Desember 2022

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemetaan aktor dan pola sentimen yang terbentuk di media sosial Twitter dalam wacana isu “Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK)”. Artikel ini menggunakan pendekatan mix method, yakni kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan pisau analisis Social Network Analysis (SNA). Data dalam kajian ini diperoleh dari media sosial Twitter yang diolah dengan Big Data Analytics dari tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan 13 September 2021. Tulisan ini mengungkap terdapat tiga akun eks pejabat publik dan dua akun media nasional yang menjadi top engagement pada isu TWK KPK di Twitter. Adapun sentimen-sentimen mengenai isu TWK KPK yang terbentuk, meliputi isu positif, negatif, dan netral.

Kata kunci: TWK KPK; Twitter; Wacana, Social Network Analysis

-
- 1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
 - 2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
 - 3 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
Email: rikaramadhan400@gmail.com.
 - 4 Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.

PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk memetakan aktor dan sentimen pada percakapan media sosial *Twitter* tentang isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Indonesia. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diadakan sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) memicu polemik di masyarakat. TWK merupakan buah dari revisi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi tersebut mengubah status KPK dari lembaga independen menjadi lembaga di bawah rumpun eksekutif. Polemik yang muncul disebabkan hasil TWK KPK yang membuat 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat. Padahal, mereka adalah pegawai yang bertahun-tahun bekerja di KPK dan memiliki integritas serta kinerja yang baik dalam pemberantasan korupsi (kumparanNEWS, 2021). Kondisi ini membuat publik di dunia maya merespons dengan menggulirkan wacana pelemahan KPK, khususnya di media sosial *Twitter*.

Topik TWK KPK menjadi viral di media sosial *Twitter* selepas pengumuman TWK KPK. Pada kesempatan itu, muncul wacana pelemahan KPK sebagai bentuk protes terhadap

fenomena tersebut. Menurut Foucault, wacana merupakan kumpulan pernyataan yang memiliki koherensi satu sama lain dan membentuk suatu konstruksi atau bangun teks (Ratu, 2012). Wacana diproduksi untuk membentuk pemahaman bersama masyarakat mengenai suatu realitas. Hal ini selaras dengan pernyataan Foucault yang menganggap bahwa wacana merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui realitas dan merupakan satu-satunya alasan yang dapat dipikirkan (Jones, 2003). Menurut Foucault, melalui suatu wacana yang mendominasi dalam suatu periode waktu tertentu, manusia memiliki kerangka pikir atau pandangan dunia tertentu yang sebenarnya dikonstruksikan (Antomo, 2013).

Foucault melihat bahwa wacana sebagai sebuah praktik sosial tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur kekuasaan dan pengetahuan. Praktik-praktik kekuasaan berada dalam setiap interaksi, relasi, atau jaringan dari sebuah relasi. Maka dari itu, kekuasaan bisa beroperasi di mana pun karena kekuasaan bukan menjadi milik sekelompok penguasa atau kelompok elitis saja. Konsep kekuasaan Foucault bahkan dapat beroperasi pada dimensi individual dalam masyarakat (Ratu, 2012). Hal ini membuka ruang bagi berbagai aktor dari pihak-pihak non penguasa dan non elitis untuk memproduksi wacana di ruang publik. Setiap aktor atau pihak yang

memiliki kemampuan untuk memproduksi wacana dan dapat menjadikan wacananya sebagai yang terunggul dalam arena kontestasi wacana mampu memengaruhi masyarakat dalam cara pandang dan tindakan.

Wacana hadir sebagai efek timbal balik antara kekuasaan dan pengetahuan. Mereka yang mampu memproduksi dan menyebarkan suatu wacana dipengaruhi oleh akses mereka terhadap pengetahuan. Pengetahuan dalam konteks kalimat sebelumnya tidak terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi dari modal sosial yang dimiliki. Menurut Putnam, modal sosial merujuk pada hubungan antar individu, yaitu jejaring sosial dan hubungan timbal balik yang menimbulkan rasa saling percaya (Hooghe dan Stolle, 2003). Modal sosial yang dimiliki seorang aktor memiliki pengaruh terhadap kemampuan memproduksi suatu wacana. Dalam kasus wacana pelemahan KPK, terdapat beberapa aktor kunci yang berpengaruh besar terhadap *engagement* dan sentimen isu TWK KPK di media sosial *Twitter*.

Munculnya wacana pelemahan KPK di media sosial *Twitter* didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini. Media sosial menjadi ruang publik baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyuarakan opini mereka. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia

merupakan pengguna aktif media sosial. Berdasarkan data dari Hootsuite (*We Are Social*) dalam Indonesia Digital Report 2020, jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia sebesar 160 juta pengguna. Terkhusus media sosial *Twitter*, jumlah penggunanya sebesar 56% dari total pengguna media sosial di Indonesia. Dengan jumlah pengguna sebanyak itu, proses produksi dan reproduksi wacana di media sosial dapat berjalan dengan cepat. Fitur-fitur di *Twitter*, seperti *like* dan *retweet* juga memudahkan penyebaran suatu wacana.

Bergulirnya wacana pelemahan KPK merupakan bentuk protes masyarakat kepada pemerintah karena telah berusaha menyingkirkan pegawai KPK yang memiliki kinerja bagus. Dari 75 pegawai itu, terdapat nama-nama penyidik senior, yaitu Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK-Yudi Purnomo Harahap, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antara Komisi dan Instansi (PJKAKI)-Sujanarko, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas)-Giri Suprapdiono (Ganesia, 2021). Mereka yang tidak lolos merupakan penyidik-penyidik senior yang memiliki *track record* bagus dalam kinerja pemberantasan korupsi. Hal itu lantas menimbulkan pertanyaan besar di publik mengenai kredibilitas TWK KPK.

Kekecewaan publik terhadap TWK KPK merupakan hal yang wajar, mengingat peran penting KPK dalam pemberantasan korupsi selama ini. KPK memiliki riwayat yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK berhasil melakukan 87 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tersangka awal sebanyak 327 orang dalam kurun waktu 2015–2019. Selain itu, KPK juga telah melakukan 498 penyelidikan, 539 penyidikan, 433 penuntutan, 286 putusan berkekuatan hukum tetap, 383 eksekusi dalam empat tahun terakhir (Lidwina, 2019). Institusi tersebut eksis selepas reformasi digulirkan. KPK sebagai *auxiliary state's agency* atau lembaga sampiran negara berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, menarik untuk mengutip distingsi yang dilakukan oleh Basarah (2014) tatkala membagi kelembagaan negara menjadi dua jenis, yakni *main state's organ* (lembaga negara utama) dan *auxiliary state's organ* (lembaga negara penunjang).

Sehubungan dengan pembagian kelembagaan tersebut, Wahyono (2003) telah mengklasifikasikan keduanya dalam jenis lembaga langsung (*unmitterbar*) dan lembaga tidak langsung (*mitterbar*). Sederhananya, lembaga negara langsung didasarkan pada konstitusi utama di suatu negara, sedangkan lembaga negara tidak langsung muncul sebagai

pelengkap dari lembaga negara langsung itu sendiri. Menurut Basarah (2014) dalam rangka menyikapi tumbuh kembangnya demokrasi yang mengisyaratkan pula perihal pemisahan kekuasaan (*separation of power*), maka krusial untuk juga menitikberatkan perhatian pada *mitterbart* tadi. Terlebih peran *auxiliary state's organ* dalam tata pemerintahan terbentuk pula dari fungsi-fungsi utama dalam skema *trias politica* ala Montesquieu, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sifatnya yang independen semakin menjadikan *auxiliary state's organ* sesuai guna menjaga efektivitas pelaksanaan kekuasaan oleh *main state's organ* (Basarah, 2014).

Tulisan ini berpandangan bahwa tujuan didirikannya *auxiliary state's organ* yang diposisikan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kekuasaan oleh *main state's organ*, sesuai dengan argumentasi Lauth (2011) tentang salah satu nilai penting dalam demokrasi, yakni pemerintahan efektif. Berdasarkan pendapat Diamond (2015), pemerintahan efektif yang merupakan nilai penting dalam demokrasi baru dapat terlaksana dengan nyata ketika tata kelola pemerintahan yang dilakukan tidak terganggu oleh patologi birokrasi, dimana salah satunya berwujud korupsi. Dengan begitu, berdirinya *auxiliary state's organ* yang memiliki konsentrasi tugas dalam penanganan kasus korupsi sebagaimana layaknya KPK yang di satu sisi juga merupakan pelengkap dari

main state's organ tergolong cukup penting dalam menjaga kehidupan berdemokrasi. Kadar urgensi adanya *main state's organ* yang berfungsi menangani kasus korupsi dapat pula dikaitkan dengan pendapat Mahdi & Pratiwi (2011) terkait mobokrasi. Menurut Mahdi & Pratiwi (2011), praktik korupsi yang alpa untuk ditangani berpotensi menghambat transisi ke arah demokratisasi seutuhnya lantaran menggiring sistem pemerintahan ke bentuk mobokrasi atau semata-mata merupakan mobilisasi demokrasi saja tanpa diiringi tindakan partisipatif dari masyarakatnya lantaran negara condong dikuasai cengkeraman kuasa oligarki yang korup.

Adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semenjak masa Orde Baru telah mendarah daging di birokrasi Indonesia. Korupsi menjadi salah satu patologi birokrasi di Indonesia yang perlu diatasi. Pembentukan KPK berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 bertujuan untuk menangani patologi tersebut. Hingga Oktober 2019, KPK telah memproses 1.064 orang dan korporasi atas kasus korupsi. Jumlah tersebut terdiri dari 255 wakil rakyat, 27 kepala lembaga dan menteri, empat duta besar, tujuh komisioner, 20 gubernur, 110 wali kota dan bupati, 208 pejabat eselon I hingga III, 22 hakim, delapan jaksa, dan dua polisi. Selain itu, ada 111 pengacara, 266 orang dari swasta, enam korporasi, dan 118 sipil yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (Kompas.com, 2020).

Dengan demikian, upaya pelemahan lembaga anti korupsi di Indonesia melalui TWK KPK sangat disayangkan mengingat banyaknya catatan prestasi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini.

Tulisan ini mengangkat wacana pelemahan KPK sebagai salah satu lembaga sampiran negara dengan melihat perbincangan tentang isu TWK KPK di media sosial *Twitter*. Mulanya, pelemahan yang dimaksud terdapat dalam revisi Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada revisi tersebut, KPK diubah menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan (Ganesia, 2021).

Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat bahwa penggunaan TWK KPK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan alat untuk menyingkirkan pegawai-pegawai lama KPK yang memperoleh label radikal atau Taliban (CNN Indonesia, 2021). Label Taliban yang berkonotasi peyoratif kerap disematkan pada oknum staf KPK yang dicap fanatik beragama dan tidak nasionalis (Aji, 2021). Pada kenyataannya, label

radikal atau taliban tersebut merupakan kartu mati yang digunakan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang tak pandang bulu dalam menindak korupsi (CNN Indonesia, 2021). Pegiat HAM sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK merupakan pelanggaran HAM berat sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 39 Tahun 1999 karena merupakan praktik diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (Kawilarang, 2021). TWK KPK dijadikan alat oleh penguasa untuk menghilangkan potensi ancaman dari KPK bagi keberlangsungan rezim pemerintahan yang berkuasa.

Besarnya animo publik terhadap kasus TWK KPK tersebut menjadi landasan bagi tulisan ini untuk mengkaji bagaimana pola perbincangan dan pemetaan aktor-aktor yang ikut berwacana, baik pro maupun kontra mengenai pelemahan KPK di media sosial. Adapun *platform* yang diobservasi adalah *Twitter*. Penyebab dipilihnya *platform Twitter* sebagai unit analisis dikarenakan banyak orang memanfaatkan *Twitter* untuk menyampaikan opini atau pemikirannya. Sebagian besar postingan di *Twitter* memiliki pesan yang berhubungan dengan pengguna atau pikiran mereka (Stieglitz & Dang-Xuan, 2013). Hal ini didukung oleh temuan sebuah riset yang mengatakan bahwa sebesar 80% aktivitas *Twitter* tergolong ke dalam kategori tersebut (Naaman *et.al.*, 2010).

Tulisan ini menggunakan pendekatan *mix method*, yakni kualitatif dan kuantitatif guna mencapai hasil penelitian yang lebih rinci dengan menggunakan pisau analisis *Social Network Analysis* (SNA). Sementara, teori yang digunakan adalah teori modal sosial dan teori wacana Foucault.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian tulisan ini yaitu metode *Social Network Analysis* (SNA) untuk menganalisis hasil temuan yang telah diperoleh. Sebab, metode analisis tersebut memiliki konsentrasi dan fokus pada *relationship research* sehingga mampu menggambarkan hubungan antar individu yang terkait sesuai basis informasi masing-masing (Kurniawan, Iriani, & Manongga, 2020). Lebih lanjut dari segi pendekatan, SNA memiliki sifat *mixed-method analysis* lantaran memadukan antara data kuantitatif yang berupa hasil *crawling* data di *Twitter* dan analisis secara kualitatif melalui penjabaran muatan sentimen yang terkandung dalam tiap-tiap data. Selain itu, SNA juga merupakan salah satu jenis teknik komputasi sosial (*social computing*) yang memiliki kegunaan untuk melakukan ekstrak informasi pada data yang berserakan dan kurang terstruktur serta cenderung memiliki volume besar.

Peranan SNA krusial pula jika hendak memahami hubungan sosial yang terjalin secara virtual. Melalui pemrosesan hasil visualisasi, maka lantas dapat terlihat user yang disimbolkan dengan titik (*nodes*) dan hubungan antar *user* yang dilambangkan dengan garis (*edges*) dalam *Online Social Network* (OSN). Oleh karenanya, SNA bisa memberikan pemahaman terkait interaksi sosial dari individu maupun kelompok. SNA dapat juga digunakan untuk mempelajari pola jaringan organisasi, ide-ide, dan orang-orang yang terhubung melalui berbagai cara dalam sebuah lingkungan (Bratawisnu & Alamsyah, 2018). Tulisan ini dilakukan dari tanggal 16 Mei hingga 13 September 2021 dengan menggunakan data berupa hasil percakapan di *Twitter*. Akun-akun *Twitter* yang dijadikan objek kajian merupakan akun-akun yang tergolong sebagai *top engaged tweet* dan *top influencer* dalam percakapan terkait isu TWK KPK di *Twitter*.

MODAL SOSIAL DAN WACANA SEBAGAI KERANGKA TEORITIK

Kajian ini menggunakan teori modal sosial dan teori wacana. Modal sosial adalah sekumpulan nilai informal atau norma yang menyebar di antara anggota kelompok yang memungkinkan kerja sama antara mereka (Malik & Dwiningrum, 2017). Modal sosial mampu menciptakan

kondisi masyarakat yang mendukung bagi berkembangnya lingkungan masyarakat yang positif. Keberadaan modal sosial dalam kehidupan masyarakat dapat menghidupkan kreativitas masyarakat dalam menggunakan media sosial dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam bermedia sosial agar tidak melanggar norma yang berlaku. Selanjutnya, modal sosial juga dapat menjadi sarana membangun kohesi di masyarakat agar memiliki persepsi yang sama untuk menjadikan media sosial berfungsi lebih optimal. Menurut Penard dan Poussing (dalam Hofer dan Aubert, 2013), internet memiliki dampak positif pada modal sosial. Internet membuka kemungkinan untuk membuat seseorang tetap terhubung dengan teman dan anggota keluarga meskipun terhalang oleh jarak.

Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *resiprokal* (timbal balik), dan interaksi sosial. *Trust* (kepercayaan) dapat mendorong seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif. *Trust* dapat disebut sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama. Unsur penting kedua dari modal sosial adalah resiprokal, dapat dijumpai dalam bentuk memberi, saling menerima, dan saling membantu yang dapat muncul

dari interaksi sosial. Unsur yang ketiga, yakni interaksi sosial. Interaksi yang semakin meluas akan menjadi semacam jaringan sosial yang lebih memungkinkan semakin meluasnya lingkup kepercayaan dan lingkup hubungan timbal balik (Agin, 2012).

Tulisan ini mengungkap bahwa diskursus yang mengindikasikan terjadi atau tidaknya pelemahan lembaga sampiran negara mestinya perlu ditelisik menggunakan teori wacana. Foucault dalam Ratu (2012) menyatakan bahwa wacana dapat didefinisikan menjadi tiga macam. *Pertama*, wacana adalah tema umum dari sebuah pernyataan. *Kedua*, wacana didefinisikan sebagai kumpulan pernyataan yang memiliki koherensi satu sama lain dan membentuk suatu konstruksi atau bangun teks. *Terakhir*, wacana merupakan sebuah strategi atau alat untuk menanamkan ideologi (Ratu, 2012). Sesuai dengan definisi kedua, wacana sebagai “general domain of statements” dalam *Archaeology of Knowledge* (1972: 80), dapat dilihat lebih jelas pada kutipan berikut:

“Lastly, instead of gradually reducing the rather fluctuating meaning of the word ‘discourse’, I believe that I have in fact added to its meanings: treating it sometimes as the general domain of all statements, sometimes as an individualizable group of statements, and sometimes as a regulated practice that accounts for a certain number of statements.”

Foucault menganggap bahwa wacana merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui realitas; satu-satunya alasan yang dapat dipikirkan (Jones, 2003). Wacana bersifat tidak dipaksakan untuk diketahui, tetapi wacana hadir karena adanya praktik-praktik sosial di masyarakat. Meski demikian, wacana bukanlah sesuatu yang mutlak kebenarannya. Menurut Foucault, wacana atau *discourse* adalah istilah untuk mewadahi semua bentuk kehidupan kultural yang dikumpulkan oleh manusia, termasuk di dalamnya usaha untuk memasuki kehidupan dengan kritik terhadap apa yang dibayangkan atau dipertimbangkan. Wacana tidak bersifat tunggal tetapi jamak (Antomo, 2013).

Wacana sebagai sebuah praktik sosial tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur kekuasaan dan pengetahuan. Foucault tidak melihat kekuasaan sebagai suatu alat yang dimiliki oleh kelas tertentu, seperti dalam pemikiran Marxian. Jika Marx mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan dari pemilik modal dan kelas pekerja sebagai objek dominasi, Foucault menganggap bahwa praktik-praktik kekuasaan berada dalam setiap interaksi, relasi, atau jaringan dari sebuah relasi (Ratu, 2012). Maka dari itu, kekuasaan bisa

beroperasi di mana pun karena kekuasaan bukan menjadi milik sekelompok penguasa atau kelompok elitis saja. Konsep kekuasaan Foucault bahkan dapat beroperasi pada dimensi individual dalam masyarakat (Ratu, 2012).

Dalam karyanya yang berjudul *History of Sexuality*, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan berada di setiap dimensi relasi dan tidak selalu terkait dengan struktur kelas sosial atau kepemilikan oleh suatu pihak (Allen, 2009). Sejalan dengan itu, wacana sebagai salah satu medium untuk menanamkan pengaruh atau dominasi kekuasaan juga dapat berasal dari pihak-pihak oposisi nonpenguasa atau di luar pemerintahan. Setiap aktor yang memiliki kemampuan untuk memproduksi wacana dan dapat menjadikan wacananya sebagai yang terunggul dalam arena kontestasi wacana mampu memengaruhi masyarakat dalam cara pandang dan tindakan.

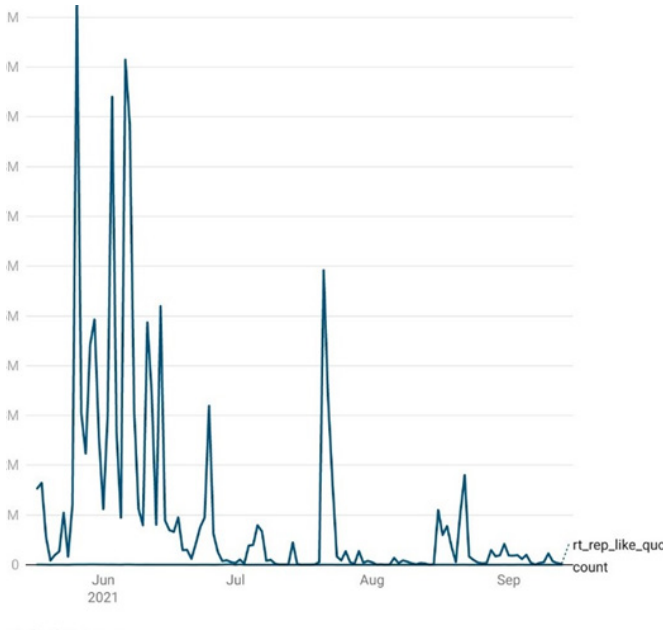
Teori wacana Foucault menganggap bahwa setiap produksi wacana di masyarakat selalu dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusikan dengan sejumlah prosedur. Prosedur yang dimaksudkan Foucault berjalan dalam rangka mengawasi sumber-sumber kuasa (*power*) yang mungkin saja timbul dan membahayakan apabila dibiarkan begitu saja tanpa kendali. Terlebih, misalnya pada sumber kuasa yang sifatnya tidak umum (atau berada di luar lingkaran

yang mapan) dimana nyatanya muncul secara kebetulan sehingga prosedur yang salah satunya berwujud eksklusi tak ayal mesti dilakukan dalam produksi wacana. Eksklusi menjadi salah satu prosedur dalam produksi wacana tersebut. Terdapat tiga jenis eksklusi atau pelarangan, yaitu larangan objektif, kontekstual, dan subjektif. Eksklusi tersebut menandakan bahwa wacana selalu terkait dengan hasrat dan kuasa (Faruk, 2008).

REPRESENTASI BEKERJANYA MODAL SOSIAL DI *TWITTER* MELALUI VISUALISASI SNA

Melalui pemetaan aktor-aktor lewat *Social Network Analysis*, dapat diperoleh kecenderungan pola interaksi yang terkuak dalam model interaksi antar *nodes* dan keterkaitannya lewat *edges* (Bratawisnu & Alamsyah, 2018). Pada bagian ini, tulisan ini berusaha memaparkan aktor-aktor kunci dalam percakapan TWK KPK di media sosial *Twitter*. Selanjutnya, tulisan ini mengurai analisis terhadap modal sosial yang dimiliki oleh aktor-aktor kunci tersebut. Dari sini, kemudian dapat diklasifikasikan akun mana yang memang memiliki kuasa lebih untuk menginternalisasikan opininya di masyarakat sehingga cenderung meredusir pengaruh dari opini lain yang sejatinya juga patut untuk dipertimbangkan.

Figur 1. *Top Timeline* TWK KPK



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar pada Figur 1 yang memuat tentang *Top Timeline* TWK KPK merupakan ikhtisar terkait seberapa besar intensitas isu TWK KPK diperbincangkan menurut kronologi waktu. Data yang dihimpun di sini merupakan hasil *crawling Twitter* dengan rentang waktu dari mulai tanggal 16 Mei 2021–13 September 2021. Pemilihan tanggal awal dimulainya proses *crawling* disandarkan pada mencuatnya isu TWK KPK untuk

pertama kali. Sedangkan pemilihan tanggal berhentinya proses *crawling* yang demikian adanya lebih dimaksudkan untuk memberikan limitasi waktu pada saat berlangsungnya proses *crawling* itu sendiri. Bertumpu dari data *crawling* *Twitter*, berikut disajikan visualisasi *Big Data* yang mencakup tentang *Social Network Analysis* (SNA), *Top Engaged Tweet*, dan *Top Influencer*.

Figur 2. Visualisasi *Big Bang* tentang SNA



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar pada Figur 2 mengenai visualisasi SNA yang disimbolkan dalam bentuk ledakan atau *big bang*, memuat informasi awal terkait akun-akun *Twitter* yang tergolong

sebagai *top influencer* di tengah banyaknya cuitan tentang isu TWK KPK. Dari sekian banyak *nodes* atau titik-titik yang mencerminkan akun-akun di *Twitter*, rupanya terdapat beberapa *nodes* yang lebih dominan ketimbang lainnya. Hal tersebut lantaran *nodes* dominan tadi memiliki tingkat *engagement* cukup tinggi dalam ruang media sosial *Twitter*. Meski modularitas antar *nodes* terlihat tumpang tindih, namun masih kentara terlihat nama-nama akun yang mempunyai popularitas unggul dalam diskursus mengenai isu TWK KPK. Deskripsi lebih detail mengenai *top influencer* tadi kemudian dimuat dalam Figur 3 berikut ini.

Figur 3. Top Influencer TWK KPK

Top Influencer TWK KPK



Created with Datawrapper

Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar pada Figur 3 menjelaskan lima akun yang tergolong sebagai *top influencer* dalam isu TWK KPK. Selanjutnya, dapat diidentifikasi latar belakang dari masing-masing akun tersebut. Adapun kelima akun yang terlihat dalam pemetaan SNA, antara lain @nazaqistsha (akun milik

Novel Baswedan—mantan penyidik KPK), @febridiansyah (akun milik Febri Diansyah—eks Juru Bicara KPK), @girisuprpdiono (akun milik Giri Suprpdiono—pernah menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK), @tempotdotco (akun milik media Tempo), dan @cnnindonesia (akun milik media CNN Indonesia).

Masing-masing akun tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. *Pertama*, akun @nazaqistsha yang merupakan akun milik Novel Baswedan (mantan penyidik KPK) yang selama masa kerjanya, Novel Baswedan berani menangani kasus-kasus yang melibatkan elit politik berpengaruh, seperti skandal mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan penangkapan terhadap jaksa Akil Mochtar yang terbukti melakukan suap (Widhana, 2017). *Kedua*, akun @febridiansyah yang dikelola secara pribadi oleh Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK. Dalam akun *Twitter*-nya, Febri Diansyah kerap membagikan *tweets* berupa satir yang berhubungan dengan isu korupsi di Indonesia. Hal tersebut biasa ia lakukan karena ia merupakan salah seorang aktivis antikorupsi (Herawati, 2021). Febri Diansyah di dalam akun *Twitter*-nya juga sempat memberikan analisa mengenai kasus TWK KPK yang dikaitkan dengan kontestasi politik 2024 (Pratama, 2021).

Ketiga, akun @girisuprpdiono milik Giri Suprpdiono yang merupakan seorang Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Namanya menjadi perbincangan di publik karena tidak lolos TWK KPK. Padahal, ia merupakan mantan pengajar materi soal wawasan kebangsaan di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah, kampus, hingga lembaga negara. Akun @girisuprpdiono juga sering membagikan *tweets* mengenai kampanye anti-korupsi. Menanggapi hasil TWK KPK, Giri Suprpdiono mengaku siap menerima tantangan debat publik mengenai wawasan kebangsaan dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Giri, hal itu penting untuk diwujudkan dalam forum terbuka agar publik mengetahui siapa yang lebih paham tentang wawasan kebangsaan (Kamil, 2021).

Akun selanjutnya adalah milik salah satu media *online* di Indonesia, yaitu Tempo.co. Melalui akun *Twitter* @tempodotco, portal berita yang telah ada sejak 1995 berusaha menampilkan berita yang tajam, cerdas, dan berimbang. Tempo.co juga menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa agar dapat menghasilkan berita yang kredibel dan terpercaya (Tempo.co, 2022).

Lalu akun terakhir adalah @cnnindonesia. Akun tersebut yang merupakan media pemberitaan yang bergelut di bidang media massa. Konten yang diberikan oleh CNN Indonesia

ialah berita nasional, internasional, bisnis, olahraga, teknologi, dan hiburan (Naqqiyah, 2020). Pada masa kasus TWK KPK, akun *Twitter* @cnnindonesia sering memberikan *update* mengenai perkembangan kasus tersebut.

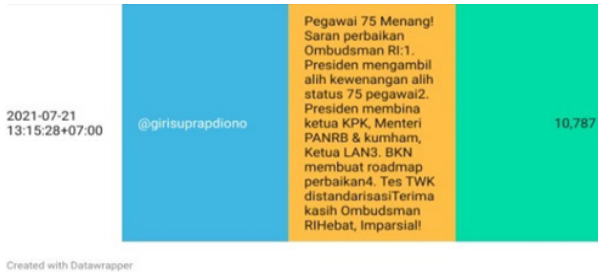
Tujuan pengidentifikasian latar belakang para pemilik akun dimaksudkan untuk memberikan gambaran soal modal sosial yang dimiliki masing-masing komunikator ketika tengah terdapat internalisasi suatu wacana. Hal ini sangat penting karena modal sosial tiap aktor berbeda-beda. Oleh karenanya, tak mengherankan jika figur-figur yang memiliki modal sosial yang kuat cenderung memiliki keunggulan bila dikomparasikan dengan yang lain.

Figur 4. *Top Engaged* TWK KPK

2021-06-14 08:56:28+07:00	@nazaqistsha	Pak FB mengatakan hasil TWK 1274 lulus, 75 tdk lulus dgn soal dan waktu yg sama.faktanya FB yg paksakan ada TWK & hasilnya disembunyikan.Ini cara licik utk singkirkan pegawai KPK yg bekerja baik.Berantas korupsi hrs Jujur.Tdk dgn pencitraan & kebohongan.	12,060
2021-06-07 10:49:41+07:00	@girisuprardiono	OTT kpk sejak revisi UJ KPK dan Kepemimpinan KPK dibawah Firli Bahuri ,merah memudar.Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan.Clear kan?	11,130

Top Engaged TWK KPK

created_at	user_screen_name	text	rt_rep_like_quote
2021-05-26 05:46:05+07:00	@nazaqistsha	Walaupun Pak Presiden sdh arahkan, oknum Pimp KPK tetap ngotot utk singkirkan pegawai KPK dgn justifikasi TWK. Ini sdh diduga, dan makin tampak by design.Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masy hrs diperjuangkan hingga tahap akhir yg bisa lakukan.	16,485
2021-06-03 08:28:38+07:00	@nazaqistsha	Prihatin, dan sedih adanya org yg berani "main kasus" di KPK.Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK.Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?	13,561



Sumber: Dokumentasi Penulis

Argumentasi soal aspek kekuasaan dan pengetahuan dapat memperkuat reliabilitas dari seorang figur, bisa diamati lewat sampel yang tertera pada tabel *Top Engaged Tweet* seperti pada gambar Figur 4. Alasannya, akun-akun seperti @nazaqistsha dan @girisuprapdiono merupakan representasi sosok sekaliber Novel Baswedan dan Giri Suprapdiono di media sosial. Dengan begitu, menjadi masuk akal bilamana cuitan dari mereka selaku figur publik dapat mengundang atensi berlebih dari netizen.

Dari data yang didapat, adanya modal sosial dalam media sosial jelas terlihat dari *top engaged* yang dua di antaranya diisi oleh akun milik Novel Baswedan dan Giri Suprapdiono. *Trust* atau rasa percaya yang tinggi masyarakat, baik kepada sosok Novel Baswedan ataupun Giri Suprapdiono. Adanya *trust* atau rasa percaya masyarakat pada kedua akun tersebut tidak lepas dari latar belakang yang dimiliki Novel Baswedan ataupun Giri Suprapdiono. Adanya modal sosial tersebut juga

dapat dilihat dari berapa banyak jumlah retweet ataupun komentar. Banyaknya atensi yang didapat oleh kedua akun ini jelas menunjukkan telah terbentuknya *trust* masyarakat yang merupakan salah satu bentuk modal sosial.

Modal sosial selanjutnya adalah *reciprocal* atau timbal balik serta interaksi sosial. Banyaknya atensi dari pengguna *Twitter* lain, baik itu *me-retweet* atau berkomentar jelas merupakan suatu interaksi sosial yang diakibatkan oleh adanya timbal balik atau respons dari masyarakat yang juga merupakan pengguna aktif *Twitter*. Dapat dilihat dari unggahan Novel Baswedan yang mendapat atensi dari 16.000 pengguna untuk *tweet* yang pertama, kemudian 12.000 pengguna untuk *tweet* kedua, serta 11.000 pengguna untuk *tweet* ketiga. Ketiga *tweet* tersebut mendapat atensi masyarakat lantaran cuitan tersebut berisi keresahan dan rasa prihatin Novel Baswedan terhadap KPK.

ANALISIS SENTIMEN SEBAGAI TOLOK UKUR PRODUKSI DAN REPRODUKSI WACANA PELEMAHAN KPK

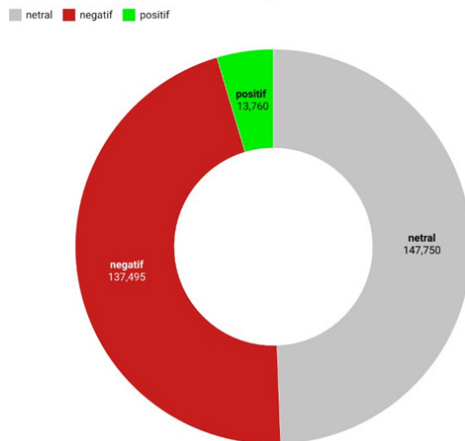
Meski telah terlihat akun-akun yang notabenehnya menempati posisi teratas dalam diskursus mengenai isu TWK KPK, namun dampak atau pengaruh dari cuitan-cuitan yang

tersebar di dunia maya mesti dijabarkan lagi guna menilik kontribusi cuitan tersebut bagi tersemainya suatu opini publik yang diterima masyarakat luas. Dengan menggunakan teori wacana Foucault sebagai pisau analisis, tulisan ini berusaha memaparkan hasil analisis sentimen terhadap isu TWK KPK.

Berikut hasil analisis sentimen dalam tulisan ini:

A. Sentimen Agregat

Figur 5. Sentimen Agregat TWK KPK



Sumber: Dokumentasi Penulis

Secara agregat, sentimen yang ditampilkan condong didominasi oleh cuitan bernada netral—yakni sebanyak 147.750 *tweets*. Meski begitu, jumlah tersebut tergolong hanya lebih unggul sedikit ketimbang sentimen negatif

terhadap isu TWK KPK, yang menyentuh angka 137.495 *tweets*. Sedangkan bagi mereka yang terlihat memandang isu TWK KPK dalam konteks positif, cenderung jadi kubu minoritas dalam keseluruhan interaksi di *Twitter* dengan perolehan 13.760 *tweets*.

B. Sentimen Negatif

Figur 6. Sentimen Negatif TWK KPK

createdat	userscreenname	text	rtreplikequote
2021-05-26 05:46:05+07:00	@nazaqistsha	Walaupun Pak Presiden sdh arahkan, oknum Pimp KPK tetap ngotot utk singkirkan pegawai KPK dgn justifikasi TWK. Ini sdh diduga, dan makin tampak by design. Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masy hrs diperjuangkan hingga tahap akhir yg bisa lakukan.	16,485
2021-06-03 08:28:38+07:00	@nazaqistsha	Prihatin, dan sedih adanya org yg berani "main kasus" di KPK. Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?	13,561
2021-06-14 08:56:28+07:00	@nazaqistsha	Pak FB mengatakan hasil TWK 1274 lulus, 75 tdk lulus dgn soal dan waktu yg sama. faktanya FB yg paksakan ada TWK & hasilnya disembunyikan. Ini cara licik utk singkirkan pegawai KPK yg bekerja baik. Berantas korupsi hrs Jujur. Tdk dgn pencitraan & kebohongan.	12,060

2021-06-07 10:49:41+07:00	@girisuprapdiono	OTT kpk sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK dibawah Firli Bahuri..merah memudar.Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan.Clear kan?	11,130
2021-06-11 21:20:00+07:00	@nazaqistsha	Hasil assesment TWK sdh diminta oleh beberapa pegawai KPK tp tdk diberikan, malah membuat stigma seolah tdk bisa dibina.Hal ini makin menampakkan adanya niat yg tdk baik.Kalo tesnya jujur, kenapa hasil TWK harus disembunyikan? #BeraniJujurPecat#SaveKPK	8,143
2021-06-25 11:29:59+07:00	@nazaqistsha	Pada kontrak antara KPK (pihak Pertama) dgn BKN (pihak Kedua) terkait assesment TWK di point f, BKN bukan penentu lulus/tdk. Hasil asesmen yg mestinya diserahkan, KPK mengaku blrn terima.Jd siapa yg berbohong?Ini sebenarnya asesmen atau operasi intelijen?	7,823

createdat	userscreenname	text	rtreplikequote
2021-05-26 05:46:05+07:00	@nazaqistsha	Walaupun Pak Presiden sdh arahkan, oknum Pimp KPK tetap ngotot utk singkirkan pegawai KPK dgn justifikasi TWK. Ini sdh diduga, dan makin tampak by design. Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masy hrs diperjuangkan hingga tahap akhir yg bisa lakukan.	16,485
2021-06-03 08:28:38+07:00	@nazaqistsha	Prihatin, dan sedih adanya org yg berani "main kasus" di KPK. Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?	13,561
2021-06-14 08:56:28+07:00	@nazaqistsha	Pak FB mengatakan hasil TWK 1274 lulus, 75 tdk lulus dgn soal dan waktu yg sama. faktanya FB yg paksakan ada TWK & hasilnya disembunyikan. Ini cara licik utk singkirkan pegawai KPK yg bekerja baik. Berantas korupsi hrs jujur. Tdk dgn pencitraan & kebohongan.	12,060
2021-06-07 10:49:41+07:00	@girisuprapdiono	OTT kpk sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK dibawah Firli Bahuri.. merah memudar. Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan. Clear kan?	11,130
2021-06-11 21:20:00+07:00	@nazaqistsha	Hasil assesment TWK sdh diminta oleh beberapa pegawai KPK tp tdk diberikan, malah membuat stigma seolah tdk bisa dibina. Hal ini makin menampakkan adanya niat yg tdk baik. Kalo tesnya jujur, kenapa hasil TWK harus disembunyikan? #BeraniJujurPecat#SaveKPK	8,143
2021-06-25 11:29:59+07:00	@nazaqistsha	Pada kontrak antara KPK (pihak Pertama) dgn BKN (pihak Kedua) terkait assesment TWK di point f, BKN bukan penentu lulus/tdk. Hasil asesmen yg mestinya diserahkan, KPK mengaku blm terima. Jd siapa yg berbohong? Ini sebenarnya asesmen atau operasi intelijen?	7,823

createdat	userscreenname	text	rtreplikequote
2021-05-26 05:46:05+07:00	@nazaqistsha	Walaupun Pak Presiden sdh arahkan, oknum Pimp KPK tetap ngotot utk singkirkan pegawai KPK dgn justifikasi TWK. Ini sdh diduga, dan makin tampak by design. Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masy hrs diperjuangkan hingga tahap akhir yg bisa lakukan.	16,485
2021-06-03 08:28:38+07:00	@nazaqistsha	Prihatin, dan sedih adanya org yg berani "main kasus" di KPK. Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?	13,561
2021-06-14 08:56:28+07:00	@nazaqistsha	Pak FB mengatakan hasil TWK 1274 lulus, 75 tdk lulus dgn soal dan waktu yg sama. Faktanya FB yg pakskakan ada TWK & hasilnya disembunyikan. Ini cara licik utk singkirkan pegawai KPK yg bekerja baik. Berantas korupsi hrs Jujur. Tdk dgn pencitraan & kebohongan.	12,060
2021-06-07 10:49:41+07:00	@girisuprapdiono	OTT kpk sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK dibawah Firlu Bahuri.. merah memudar. Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan. Clear kan?	11,130
2021-06-11 21:20:00+07:00	@nazaqistsha	Hasil assesment TWK sdh diminta oleh beberapa pegawai KPK tp tdk diberikan, malah membuat stigma seolah tdk bisa dibina. Hal ini makin menampakkan adanya niat yg tdk baik. Kalo tesnya jujur, kenapa hasil TWK harus disembunyikan? #BeraniJujurPecat#SaveKPK	8,143
2021-06-25 11:29:59+07:00	@nazaqistsha	Pada kontrak antara KPK (pihak Pertama) dgn BKN (pihak Kedua) terkait assesment TWK di point f, BKN bukan penentu lulus/tdk. Hasil asesmen yg mestinya diserahkan, KPK mengaku blm terima. Jd siapa yg berbohong? Ini sebenarnya asesmen atau operasi intelijen?	7,823

Sumber: Dokumentasi Penulis

Terkhusus menyangkut tentang sentimen negatif yang mengiringi diskursus TWK KPK, cuitan dari akun @nazaqistsha rupanya memiliki pamor cukup tinggi. Dari keseluruhan sampel sentimen negatif yang telah dihimpun (enam cuitan), tercatat ada lima cuitan yang berasal dari akun @nazaqistsha—dengan satu cuitan merupakan milik @girisuprardiono. Secara umum, detail dari tiap-tiap cuitan mengindikasikan bahwa TWK KPK merupakan sebuah upaya politis untuk mengeluarkan anggota-anggota KPK berkinerja bersih lantaran disinyalir dapat mengganjal kepentingan elit tertentu jikalau tidak disingkirkan.

Cuitan dari @nazaqistsha tampil mencolok dengan mendominasi 5 dari 6 cuitan bersentimen negatif dengan pamor tertinggi. Cuitan dari mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan tersebut memiliki total *engagement* yang meliputi *reply*, *retweet*, *like*, dan *quote* sebanyak 16.385 kali. Hal tersebut menjadikan @nazaqistsha menjadi aktor kunci dalam produksi wacana pelemahan KPK di *Twitter*. Latar belakang pemilik akun tersebut berpengaruh besar dalam produksi dan penyebaran wacana pelemahan KPK. Mantan penyidik senior KPK tersebut memiliki sederet prestasi cemerlang saat masih bertugas. Ia berhasil membawa pulang Bendahara Demokrat Muhammad Nazaruddin dari pelariannya di Kolombia. Lalu, ia juga mengungkap kasus wisma atlet yang

menyeret anggota DPR Angelina Sondakh. Novel Baswedan juga berhasil menjebloskan Nunun Nurbaeti ke dalam penjara terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004 lalu. Terakhir, Novel Baswedan berjasa dalam membongkar kasus jual beli perkara Pemilukada dengan keterlibatan mantan Ketua MK Akil Mochtar (Merdeka.com, 2021).

Sederet prestasi Novel Baswedan selama bertugas meninggalkan kesan positif bagi publik. Popularitasnya sebagai tokoh publik juga berpengaruh besar ketika Novel Baswedan bersuara tentang kegagalan yang ada di TWK KPK. Berbagai cuitannya yang secara umum menyatakan bahwa ada upaya pelemahan KPK mudah diterima oleh publik di dunia maya. Adanya fitur *like* dan *retweet* di *Twitter* turut mempercepat penyebaran wacana pelemahan KPK. Dalam hal ini, Novel Baswedan menjadi tokoh kunci dalam memproduksi wacana terlepas dari statusnya sebagai kelompok non-penguasa. Hal ini sejalan dengan proses bekerjanya suatu wacana seperti yang dimaksud Foucault. Wacana menjadi medium untuk menanamkan pengaruh atau dominasi kekuasaan yang berasal dari pihak-pihak non penguasa. Setiap aktor atau pihak yang memiliki kemampuan untuk memproduksi wacana mampu memengaruhi masyarakat dalam cara pandang dan tindakan.

Definisi *power* menurut Foucault, yaitu bahwa praktik kekuasaan dapat berada di setiap relasi, interaksi, atau jaringan dari sebuah relasi (Ratu, 2012). Hal ini terlihat dalam wacana pelemahan KPK dimana Novel Baswedan mampu memproduksi wacana berbekal jaringan yang dimilikinya. Jaringan yang dibentuk selama menjadi penyidik juga turut membantu proses reproduksi wacana yang ia gulirkan. Hal ini penting karena semakin luas jaringan yang dimiliki seorang aktor, maka akan semakin kuat juga pengaruh yang dimilikinya. Dengan kondisi demikian, logis apabila temuan penelitian menunjukkan akun @nazaqistsha menduduki urutan teratas dalam daftar *tweets* dengan total *engagement* terbanyak.

C. Sentimen Netral

Figur 7. Sentimen Netral TWK KPK

[Sentimen Netral TWK KPK]

createdat	userscreenname	text	rtrep
2021-07-21 13:15:28+07:00	@girisuprapdiono	Pegawai 75 Menang! Saran perbaikan Ombudsman RI:1. Presiden mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai2. Presiden membina ketua KPK, Menteri PANRB & kumham, Ketua LAN3. BKN membuat roadmap perbaikan4. Tes TWK distandarisasiTerima kasih Ombudsman RIHebat, Imparsial!	
2021-06-06 09:30:59+07:00	@temponewsroom	Ketua KPK Firlu Bahuri diduga sudah membuat daftar nama pegawai yang akan dipeka sejak November 2020. Ia ditengarai memaksa pemimpin KPK yang lain menyetujui TWK dan menyelundupkan pasal tersebut dalam peraturan KPK. #MajalahTempo	
2021-06-10 21:11:43+07:00	@fraksirakyatid	Alerta!! Aksi Serentak Di UdaraKetua KPK Firlu Bahuri sudah terlalu ngadi-TWK diselundupkan, dipaksakan untuk singkirkan 75 nama pegawai KPK penyelamat uang negara. -A Thread-	
2021-07-06 15:54:07+07:00	@girisuprapdiono	TRANSPARANCY INTERNATIONALLembaga Internasional yg berpusat di Berlin bersurat ke Presiden Jokowi, tanda bahaya, alarm, pemberantasan korupsi di Indonesia.Pelemahan KPK, disempurnakan dgn upaya TWK u/ menyingkirkan pegawai simbol marwah KPK, membahayakan pemberantasan korupsi	
2021-06-04 16:22:53+07:00	@tempodotco	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlu Bahuri absen dari undangan agenda debat yang dihadiri eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono. #TempoNasional	
2021-06-02 17:30:00+07:00	@cnnindonesia	1.351 pegawai KPK mengikuti TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Namun, dalam tes tersebut muncul beberapa pertanyaan 'konyol' yang ditanyakan kepada pegawai KPK. Lihat selengkapnya di #Infografis #CNNIndonesia	

createdat	userscreenname	text	rtrep
2021-07-21 13:15:28+07:00	@girisuprapdiono	Pegawai 75 Menang! Saran perbaikan Ombudsman RI:1. Presiden mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai2. Presiden membina ketua KPK, Menteri PANRB & kumham, Ketua LANS3. BKN membuat roadmap perbaikan4. Tes TWK distandarisasiTerima kasih Ombudsman RIHebat, Imparsial!	
2021-06-06 09:30:59+07:00	@temponewsroom	Ketua KPK Firlil Bahuri diduga sudah membuat daftar nama pegawai yang akan didepak sejak November 2020. Ia ditengarai memaksa pemimpin KPK yang lain menyetujui TWK dan menyelundupkan pasal tersebut dalam peraturan KPK. #MajalahTempo	
2021-06-10 21:11:43+07:00	@fraksirakyatid	Alerta!! Aksi Serentak Di UdaraKetua KPK Firlil Bahuri sudah terlalu ngadimgadi.TWK diselundupkan, dipaksakan untuk singkirkan 75 nama pegawai KPK penyelamat uang negara. -A Thread-	
2021-07-06 15:54:07+07:00	@girisuprapdiono	TRANSPARANCY INTERNATIONALLEmbaga Internasional yg berpusat di Berlin bersurat ke Presiden Jokowi, tanda bahaya, alarm, pemberantasan korupsi di Indonesia.Pelemahan KPK, disempurnakan dgn upaya TWK u/ menyingkirkan pegawai simbol marwah KPK, membahayakan pemberantasan korupsi	
2021-06-04 16:22:53+07:00	@tempodotco	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri absen dari undangan agenda debat yang dihadiri eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono. #TempoNasional	
2021-06-02 17:30:00+07:00	@cnnindonesia	1.351 pegawai KPK mengikuti TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Namun, dalam tes tersebut muncul beberapa pertanyaan 'konyol' yang ditanyakan kepada pegawai KPK. Lihat selengkapnya di #Infografis #CNNIndonesia	

createdat	userscreenname	text	rtrep
2021-07-21 13:15:28+07:00	@girisuprapdiono	Pegawai 75 Menang! Saran perbaikan Ombudsman RI:1. Presiden mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai2. Presiden membina ketua KPK, Menteri PANRB & kumham, Ketua LAN3. BKN membuat roadmap perbaikan4. Tes TWK distandarisasiTerima kasih Ombudsman RIHebat, Imparsial!	
2021-06-06 09:30:59+07:00	@temponewsroom	Ketua KPK Firlu Bahuri diduga sudah membuat daftar nama pegawai yang akan dipeka sejak November 2020. Ia ditengarai memaksa pemimpin KPK yang lain menyetujui TWK dan menyelundupkan pasal tersebut dalam peraturan KPK. #MajalahTempo	
2021-06-10 21:11:43+07:00	@fraksirakyatid	Alerta!! Aksi Serentak Di UdaraKetua KPK Firlu Bahuri sudah terlalu ngadi-ngadi.TWK diselundupkan, dipaksakan untuk singkirkan 75 nama pegawai KPK penyelamat uang negara. -A Thread-	
2021-07-06 15:54:07+07:00	@girisuprapdiono	TRANSPARANCY INTERNATIONALLembaga Internasional yg berpusat di Berlin bersurat ke Presiden Jokowi, tanda bahaya, alarm, pemberantasan korupsi di Indonesia.Pelemahan KPK, disempurnakan dgn upaya TWK u/ menyingkirkan pegawai simbol marwah KPK, membahayakan pemberantasan korupsi	
2021-06-04 16:22:53+07:00	@tempodotco	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlu Bahuri absen dari undangan agenda debat yang dihadiri eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono. #TempoNasional	
2021-06-02 17:30:00+07:00	@cnnindonesia	1.351 pegawai KPK mengikuti TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Namun, dalam tes tersebut muncul beberapa pertanyaan 'konyol' yang ditanyakan kepada pegawai KPK. Lihat selengkapnya di #Infografis #CNNIndonesia	

Sumber: Dokumentasi Penulis

Data tersebut memperlihatkan sentimen netral terhadap isu TWK KPK. Dari beberapa akun yang memang muncul dalam pemetaan SNA, terdapat akun lain yang tersorot seperti @fraksirakyatid. Hal yang lumrah adanya ketika akun tersebut memiliki tingkat *engagement* lebih tinggi dibanding dengan akun-akun populer dalam pemetaan SNA. Melalui sampel cuitan yang berhasil diperoleh, sentimen netral bukan berarti bahwasanya seseorang memiliki sikap tak acuh terhadap suatu isu atau apolitis, melainkan lebih kepada muatan isi dari cuitan-cuitan tersebut yang kadang kala tidak dapat terdeteksi secara jelas intensinya oleh *Artificial Intelligence* (AI) pada modul *Big Data*. Akibatnya, di sini tak begitu tampak distingsi yang nyata menunjukkan apakah akun tertentu pro atau justru kontra terhadap isu TWK KPK.

Beberapa cuitan seperti dari @temponewsroom, @cnnindonesia, dan @tempodotco memang tergolong netral dan objektif lantaran memiliki latar belakang sebagai akun media pemberitaan. Tetapi, cuitan dari @girisuprapdiono maupun dari @fraksirakyatid tampak condong mempersepsikan isu TWK KPK sebagai sesuatu yang memiliki konotasi negatif. Bilamana masih banyak sampel data lain yang seperti itu adanya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perolehan data sentimen netral terdiri pula atas sentimen bernada negatif atau mungkin positif.

Jika dibandingkan dengan daftar *tweets* dengan sentimen negatif, sentimen netral memiliki daftar *tweets* dari akun yang lebih beragam. Terdapat lima akun berbeda yang menempati urutan tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, akun-akun media pemberitaan seperti @temponewsroom, @cnnindonesia, dan @tempodotco cenderung mengemas wacana pelemahan KPK dalam nuansa yang objektif. Di sisi lain, akun-akun seperti @girisuprapdiono dan @fraksirakyatid mengemas wacana pelemahan KPK dalam bentuk negatif. Hal ini dapat dipahami lantaran akun @girisuprapdiono merupakan akun dari Giri Suprapdiono yang dulu menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Antikorupsi KPK (Kamil, 2021). Sedangkan @fraksirakyatid merupakan akun koalisi masyarakat sipil. Berdasarkan penelusuran pada laman profil akun *Twitter*-nya, diketahui bahwa akun ini selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan kalangan sipil. Dalam kasus TWK KPK, akun ini masih gencar mereproduksi wacana pelemahan KPK hingga kini dengan menge-*like* dan me-*retweet* info berkaitan TWK KPK.

D. Sentimen Positif

Figur 8. Sentimen Positif TWK KPK

createdat	userscreenname	text	rtreplikequ
2021-05-17 22:07:01+07:00	@nazaqistsha	Proses TWK yg dibuat Pimp KPK "seolah 75 peg KPK tdk lulus itu" membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasila. Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi , apresiasi atas perhatian bapak.	9,
2021-05-30 11:26:59+07:00	@sudirmansaid	Kebenaran tak bisa dikalahkan, meskipun bisa disalahkan. Selamat berjuang rekan-rekan KPK. Saya yakin nurani rakyat di belakang kalian, karena sejarah selalu mencari jalannya sendiri. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.	4,
2021-06-24 11:26:27+07:00	@febridiansyah	Bapak sehat? Jadi benar bagian dari proses TWK ini aktivitas intelijen? Semoga sehat2 ya Pak... Dijauhkan dari marabahaya... Negeri ini butuh orang seperti Bapak.. Yg sangat setia.. Sangat berwawasan kebangsaan..	3,
2021-06-01 11:16:30+07:00	@generasimudanu	1) Hemat kami TWK KPK Penting meski banyak catatan, mengingat anggota Partai yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin semakin banyak masuk ke institusi pemerintahan. Dan kami tetap berkomitmen, dimana PKS berlabuh, kami dukung lawannya -..	2,
2021-09-09 22:04:14+07:00	@nazaqistsha	MA telah buat putusan peg KPK yg tdk lulus TWK mjd wewenang pemerintah. Stlh putusan MK dan MA, jg adanya Banding Administrasi, rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yg diterima Presiden, selanjutnya tinggal respon bapak Presiden @jokowi Salam anti korupsi	2,
2021-07-21 13:10:42+07:00	@katabewe	1. DAHSYAT. Ada setitik oase yg muncrat dr Ombudsman ketika lembaga ini memutuskan 75 KPK yg tak lulus KPK harus jadi ASN sblm 30 Oktober 2021. Bingo. Proficiat	2,

createdat	userscreenname	text	rtreplikequ
2021-05-17 22:07:01+07:00	@nazaqistsha	Proses TWK yg dibuat Pimp KPK "seolah 75 peg KPK tdk lulus itu" membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasila. Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi , apresiasi atas perhatian bapak.	9,
2021-05-30 11:26:59+07:00	@sudirmansaid	Kebenaran tak bisa dikalahkan, meskipun bisa disalahkan. Selamat berjuang rekan-rekan KPK. Saya yakin nurani rakyat di belakang kalian, karena sejarah selalu mencari jalannya sendiri. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.	4,
2021-06-24 11:26:27+07:00	@febridiansyah	Bapak sehat?Jadi benar bagian dari proses TWK ini aktivitas intelijen?Semoga sehat2 ya Pak... Dijauhkan dari marabahaya... Negeri ini butuh orang seperti Bapak.. Yg sangat setia.. Sangat berwawasan kebangsaan..	3,
2021-06-01 11:16:30+07:00	@generasimudanu	1) Hemat kami TWK KPK Penting meski banyak catatan, mengingat anggota Partai yang berafiliasi dengan Ikhwani Muslimin semakin banyak masuk ke institusi pemerintahan.Dan kami tetap berkomitmen, dimana PKS berlabuh, kami dukung lawannya -..	2,
2021-09-09 22:04:14+07:00	@nazaqistsha	MA telah buat putusan peg KPK yg tdk lulus TWK mjd wewenang pemerintah.Stlh putusan MK dan MA, jg adanya Banding Administrasi, rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yg diterima Presiden,selanjutnya tinggal respon bapak Presiden @jokowi Salam anti korupsi	2,
2021-07-21 13:10:42+07:00	@katabewe	1. DAHSYAT. Ada setitik oase yg muncrat dr Ombudsman ketika lembaga ini memutuskan 75 KPK yg tak lulus KPK harus jadi ASN sblm 30 Oktober 2021. Bingo. Proficiat	2,

createdat	userscreenname	text	rtreplikequ
2021-05-17 22:07:01+07:00	@nazaqistsha	Proses TWK yg dibuat Pimp KPK "seolah 75 peg KPK tdk lulus itu" membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasila. Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi , apresiasi atas perhatian bapak.	9,
2021-05-30 11:26:59+07:00	@sudirmansaid	Kebenaran tak bisa dikalahkan, meskipun bisa disalahkan. Selamat berjuang rekan-rekan KPK. Saya yakin nurani rakyat di belakang kalian, karena sejarah selalu mencari jalannya sendiri. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.	4,
2021-06-24 11:26:27+07:00	@febridiansyah	Bapak sehat?Jadi benar bagian dari proses TWK ini aktivitas intelijen?Semoga sehat2 ya Pak... Dijauhkan dari marabahaya... Negeri ini butuh orang seperti Bapak.. Yg sangat setia.. Sangat berwawasan kebangsaan..	3,
2021-06-01 11:16:30+07:00	@generasimudanu	1) Hemat kami TWK KPK Penting meski banyak catatan, mengingat anggota Partai yang berafiliasi dengan Ikhwani Muslimin semakin banyak masuk ke institusi pemerintahan.Dan kami tetap berkomitmen, dimana PKS berlabuh, kami dukung lawannya -..	2,
2021-09-09 22:04:14+07:00	@nazaqistsha	MA telah buat putusan peg KPK yg tdk lulus TWK mjd wewenang pemerintah.Stlh putusan MK dan MA, jg adanya Banding Administrasi, rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yg diterima Presiden,selanjutnya tinggal respon bapak Presiden @jokowi Salam anti korupsi	2,
2021-07-21 13:10:42+07:00	@katabewe	1. DAHSYAT. Ada setitik oase yg muncrat dr Ombudsman ketika lembaga ini memutuskan 75 KPK yg tak lulus KPK harus jadi ASN sblm 30 Oktober 2021. Bingo. Proficiat	2,

Sumber: Dokumentasi Penulis

Mengacu pada sampel sentimen positif seperti pada data di Figur 8, selain munculnya *top influencer* macam @nazaqistsha dan @febridiansyah yang memang telah terpetakan pada hasil analisis SNA sebelumnya, terdapat pula akun-akun lain. Misalnya saja, @sudirmansaid (akun milik Sudirman Said—seorang mantan Menteri di kabinet Presiden Jokowi), @generasimudanu (akun yang merepresentasikan generasi muda dari ormas NU), dan @katabewe (akun milik Bambang Widjojanto—eks Komisioner KPK). Kehadiran akun-akun tersebut tak terlepas dari statistik sentimen keseluruhan, dimana muatan sentimen positif yang dicitrakan tergolong sangat kecil ketimbang sentimen lain. Hal ini memungkinkan bagi akun-akun yang tak terlacak dalam SNA untuk digolongkan sebagai *top influencer* dengan rerata *engagement* tinggi, khususnya menyangkut soal sentimen positif.

Beralih pada isi cuitan yang tergambar lewat data tersebut, sentimen positif atas isu TWK KPK tidak serta merta memperlihatkan upaya pembelaan terhadap munculnya TWK KPK secara jelas. Hal ini lantaran sentimen positif yang termuat, mesti dimaknai sebagai cuitan dengan nada optimis dalam menyongsong perkembangan isu TWK KPK ke arah yang lebih menguntungkan pihak kontra. Di satu sisi, terdapat pula cuitan bernada satir dari @febridiansyah yang

ditujukan guna menyindir inisiator dari TWK KPK karena telah membuat tes macam itu. Satu-satunya cuitan yang tampak menyetujui perihal TWK KPK, yakni @generasimudanu lebih didasari pada pertentangan kepentingan politis semata tanpa kejelasan basis argumentatif.

KESIMPULAN

Berkenaan atas data sentimen yang diperlihatkan pada bagian sebelumnya, perbincangan seputar isu TWK KPK tampak didominasi oleh cuitan bernada netral secara persentatif—diikuti cuitan bermuatan negatif yang hanya berjarak tipis. Sedangkan sentimen positif justru menjadi minoritas. Meski cuitan bernada netral unggul, namun pengaruh dari cuitan-cuitan netral tersebut dalam pembentukan wacana sukar dideteksi—lantaran kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) *Big Data* tak mampu membedakan intensi tiap cuitan secara tepat. Tulisan ini menganggap bahwa cuitan yang terpampang pada sentimen netral kemudian bisa jadi terdiri dari sentimen positif atau negatif pula.

Walau demikian, bukan berarti sentimen positif dapat dijadikan patokan karena kandungan sentimen positif di tiap-tiap cuitan justru tidak melulu menunjukkan pendapat

pro terhadap isu TWK KPK, melainkan lebih mengisyaratkan kata-kata bernada optimistis dalam menyongsong perkembangan isu TWK KPK ke depan. Selain itu, sentimen positif juga hanya mempunyai proporsi yang minoritas dalam keseluruhan data sentimen. Oleh sebab itu, acuan yang mestinya digunakan untuk menilai pembentukan diskursus soal TWK KPK adalah sentimen negatif karena memang secara jelas merefleksikan cuitan berkonotasi kontra atas kata kunci yang dimasukkan. Jumlah cuitan dengan sentimen negatif yang tinggi menjadi patokan bahwa produksi dan internalisasi wacana pelemahan KPK di *Twitter* telah berlangsung. Hal ini menandakan bahwa aktor-aktor kunci telah berhasil dalam memproduksi wacana tersebut yang kemudian direproduksi melalui berbagai fitur *Twitter* seperti *like* dan *retweet*.

REFERENSI

- Allen, A. (2009). The Foucauldian Peacekeeper: On The Dispersion of Power and The Futility of Change. *Power and Education*, 226–237.
- Antomo, C. W. (2013). *Relasi Kuasa dalam Novel Merajut Harkat Karya Putu Oka Sukanta. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- CNN Indonesia. (2021). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528073926-12-647698/kartu-mati-pelemahan-kpk-radikalisme-taliban-nilai-merah>, 2 November 2021.
- Faruk. (2008). *Pascastrukturalisme: Teori, Implikasi, Metodologi, dan Contoh Aplikasi*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books.
- Ganesia, I. (2021). *tirto.id*. <https://tirto.id/merunut-kinerja-kpk-pasca-revisi-undang-undang-gf7e>, 7 November 2021.
- Herawati, Nani. (2021). *Pikiranrakyat.com*. Satire ala Febri Diansyah, Kisah Pencuri Sapi yang Minta Maaf. Dilansir melalui laman <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143151845/satire-ala-febri-diansyah-kisah-pencuri-sapi-yang-meminta-maaf?page=3>, 4 Desember 2021.

- Hofer, M., and Viviane Aubert. "Perceived Bridging and Bonding Social Capital on Twitter: Differentiating between Followers and Followees." *Computers in Human Behavior* 29, no. 6 (2013): 2134–42. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.04.038>.
- Hooghe, M., & Dietlind Stolle (2003). *Generating Social Capital*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jones, P. (2003). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kawilarang, R. (2021). *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-57401804>, 4 Juli 2021.
- Kompas.com. 2021. Giri Suprapdiono Istilahkan Pemecatan Pegawai KPK "G30STWK". Nasional.kompas.com. Diakses melalui laman <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/16/08093601/giri-suprapdiono-istilahkan-pemecatan-pegawai-kpk-g30stwk?page=all>, pada tanggal 5 Desember 2021.
- Kompas.com. (2020). Kompas.com. Dipetik dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya>, 7 November 2021.
- KumparanNEWS. (2021). *KumparanNEWS*. Dipetik dari <https://kumparan.com/kumparannews/perjalanan-kontroversi-twk-yang-berujung-pemecatan-57-pegawai-kpk-1wcBfOit1I2/4>, 4 Desember 2021.

- Agin, S. H. (2012). *Kelompok Mina Mawar Sebagai Bentuk Kemandirian Sosial Masyarakat Pasca Erupsi Merapi. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Malik, Imam, and Siti Irene Dwiningrum. "Modal Sosial Dan Media Sosial Pada Masyarakat Cyber Di Desa Melung, Kabupaten Banyumas." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 5, no. 2 (2018): 140. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v5i2.15369>.
- Merdeka.com. (2021). *Merdeka.com*. Dipetik dari <https://www.merdeka.com/novel-baswedan/profil/>, 4 Desember 2021.
- Naqqiyah, Maulidatus Syahrotin. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Media *Online* CNN Indonesia.com dan Tirtoid mengenai Kasus Pandemi Covid-19. *Jurnal Kopis*. Vol 03. Hal 18–27.
- Nusa, Lukman. 2016. Halaman Muka Majalah Tempo (Studi Analisis isi Perbedaan Halaman Muka Sebagai Representasi Tajuk Utama Majalah Tempo Edisi Tahun 1993/1994 dengan Tahun 2009/2010). *Jurnal Ilmu Komunikasi UIN*. Vol. 09. No. 01. 21–31.
- Pratama, Ilham Rian. *KPK Jawab Analisa Febri Diansyah yang Sebut Polemik TWK Berkaitan Kontestasi Politik 2024*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/07/kpk-jawab-analisa-febri-diansyah-yang-sebut-polemik-twk-berkaitan-kontestasi-politik-2024?page=2>, pada 05 Desember 2021.

Ratu, T. (2012). *Analisis Wacana Homoseksual di Dalam Film "All You Need Is Love- Meine Schwiegertochter Ist Ein Mann"*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Tempo.id. Tempo Media Group. Diakses melalui laman https://www.tempo.id/_corporate.php, 5 Desember 2021.

